

Bab - 5

FAKTOR-FAKTOR PENTING PENGEMBANGAN JAIP



5.1 ARAHAN STRUKTUR RUANG PROV. JAMBI TAHUN 2006-2020

Konsep pengembangan tata ruang Provinsi Jambi 2003-2018 dibangun berdasarkan evaluasi kinerja RTRWP Jambi 1993 serta perkembangan dan perubahan yang berlangsung dewasa ini. Dalam jangka panjang, pendekatan yang dipilih dalam pengembangan dan pemanfaatan ruang Provinsi Jambi adalah pendekatan keseimbangan pertumbuhan proporsional (balance growth) dalam posisi yang berbeda dengan tujuan menciptakan keterkaitan proses hulu-hilir yang kuat dalam setiap satuan ruang pengembangan, yang pada akhirnya mampu mendorong tumbuhnya keterkaitan antara sektor primer di hulu dengan sektor sekunder dan tersier di hilir sebagai proses pertambahan nilai yang berlangsung secara setempat.

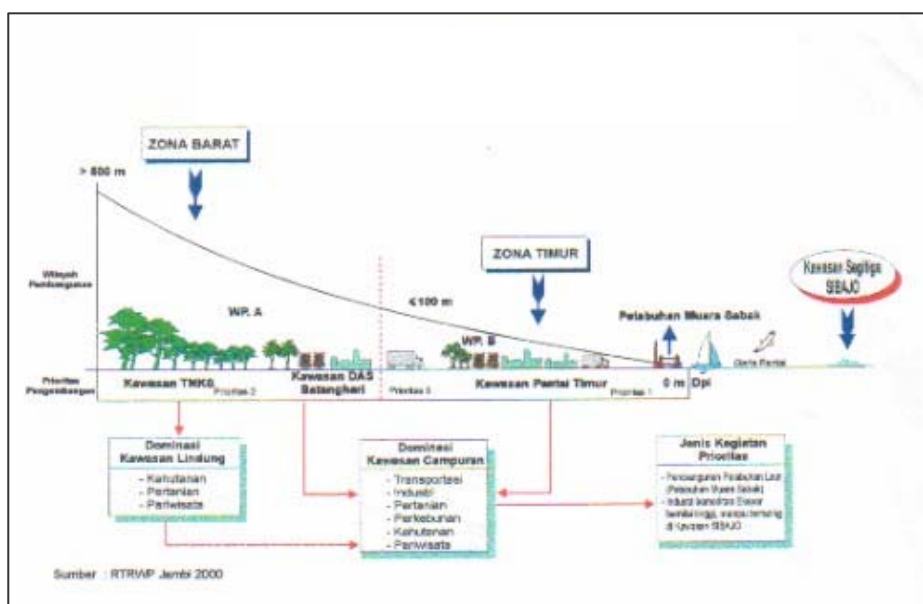
Penetapan konsep dasar pengembangan tata ruang Jambi tersebut dilandasi oleh pertimbangan berikut :

- ❑ Kondisi geografis Jambi relatif luas dan memiliki topografi dan morfologi yang tidak homogen, sehingga faktor jarak dan aksesibilitas tidak selalu dapat mendorong terbentuknya satuan ruang yang efisien dalam tata kaitan masukan (input) dan keluaran (output) sektor produksi;
- ❑ Kondisi ekologis wilayah Jambi mensyaratkan upaya konservasi yang ketat untuk dapat mendukung usaha-usaha produksi yang berkelanjutan di daerah-daerah bawahannya. Daur ekologis yang perlu dilestarikan dalam setiap satuan ekosistem tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan memperluas usaha budidaya untuk membangun tata kaitan antara sektor maupun antar wilayah perlu mempertimbangkan fungsi ekologis dari lingkungan setempat.

Disamping itu, konsep penataan ruang ini tetap mengakomodasikan hal-hal yang masih relevan di dalam RTRW 1993, antara lain pembagian zona wilayah berdasarkan konsep gabungan antara mengakomodasikan Keppres 32/1990 dan pendekatan aspek pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang terjadi sebagai antisipasi perkembangan **segitiga pertumbuhan SIBAJO** dengan tetap memperhatikan fenomena kebutuhan masyarakat terhadap ruang yaitu dengan membagi wilayah Provinsi Jambi menjadi 3 wilayah, yaitu:

- ❑ Zona barat (atas) karena fungsinya sebagai penjaga stabilitas ekosistem wilayah tengah dan bawah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
- ❑ Zona tengah, yang intensitas kegiatan ekonomi saat ini tinggi dan yang akan datang diperkirakan akan semakin meningkat, diarahkan sebagai kawasan budidaya;
- ❑ Zona timur (bawah), karena kondisi alam dan potensi ekonominya berimbang, diarahkan sebagai kawasan campuran. Arahkan kawasan campuran ini didasarkan pada sifat lindung yang dibutuhkan yaitu lindung setempat. Dengan demikian, pembudidayaan ruang diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, kawasan gambut dan sempadan pantai serta cagar alam tak akan banyak mengganggu fungsi lindung setempatnya. Bahkan dalam kawasan lindung bergambutpun masih mungkin dilakukan kegiatan budidaya, sepanjang tidak merusak fungsi lindungnya.

Gambar 2. 1 Konsep Penataan Ruang Wilayah Provinsi Jambi



*Penetapan zonasi pengembangan wilayah ini merupakan peluang tersendiri bagi pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak, karena selaras dengan konsep pemanfaatan ruang yang **memprioritas kawasan timur sebagai kawasan pengumpul dan kawasan industri dengan memanfaatkan spill over effect dari pertumbuhan SIBAJO.***

Berdasarkan konsep tersebut, struktur ruang wilayah Provinsi Jambi akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kawasan barat yang berpusat di sepanjang jalur lintas Sumatera dan kawasan timur yang terpusat di jalur lintas Sumatera bagian timur. Disisi lain arah orientasi diagonal barat daya-timur laut akan dikembangkan dengan dukungan sistem interaksi antar kawasan yang membentuk pola segitiga pertumbuhan di tiap kawasan. Keadaan ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan seperti adanya perbedaan laju pertumbuhan antar daerah dan terkonsentrasinya kegiatan pada titik-titik tertentu saja.

Untuk mencapai keseimbangan pola pemanfaatan ruang, disusun sistem kota-kota. Sistem kota-kota ini bukan hanya untuk pelayanan internal tetapi terutama sebagai titik-titik pusat pertumbuhan. Titik pusat pertumbuhan tersebut harus berada dalam sistem yang mengkaitkan fungsi, peran dan jangkauan pelayanan dari setiap titik tersebut, sehingga di dapat optimasi pelayanan dari titik-titik pusat pertumbuhan.

Konsep sistem kota-kota di Provinsi Jambi didasarkan pada pendekatan pemerataan dan sekaligus pertumbuhan dengan melihat peluang ekonomi SIBAJO, keserasian pemanfaatan ruang (dampak lingkungan) serta respon kecenderungan perkembangan kota-kota **dengan mempertimbangkan Muara Sabak sebagai "pintu keluar"** bagi produk-produk ekonomi Jambi dan wilayah Sumatera bagian tengah lainnya.

Sistem kota-kota di Provinsi Jambi diarahkan berjenjang / berhirarki, sesuai dengan cakupan pelayanannya :

1. Pusat Pelayanan Nasional (PKN), yaitu yang melayani wilayah Provinsi Jambi serta wilayah nasional serta mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional. Pusat pelayanan ini terdapat di Kota Jambi dan sekitarnya, oleh karena itu kota ini diarahkan sebagai pusat aktifitas sekunder dan tersier.
2. Pusat Pelayanan Regional/Wilayah (PKW) yaitu pusat kegiatan pemerintahan, sosial, ekonomi dan transportasi yaitu wilayah kabupaten/kota yang berdekatan/berbatasan. Pusat pelayanan ini terdapat

di Kota Muara Bungo, Kuala Tungkal dan **Kota Muara Sabak**. Kota Muara Bungo dikembangkan dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya dan Kota Kuala Tungkal dikembangkan sebagai daerah transit dan pintu gerbang Provinsi Jambi terhadap wilayah segitiga pertumbuhan SIBAJO sedangkan Muara Sabak dikembangkan sebagai daerah Pelabuhan (*Outlet*) utama Provinsi Jambi.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kota-kota kabupaten dan kota-kota yang berfungsi sebagai pusat simpul jasa distribusi barang dalam satu kabupaten dan mempunyai potensi untuk mendorong kota-kota kecamatan (daerah belakangnya). PKL ini dapat dikategorikan kedalam PKL Primer dan PKL Sekunder.

PKL Primer adalah Ibukota Kabupaten yang melayani wilayahnya dalam aspek pemerintahan dan ekonomi yakni meliputi ibukota kabupaten yang tidak termasuk PKL yakni Kota Sungai Penuh, Bangko, Sarolangun, Muara Tebo, Muara Bulian, Sarolangun dan Sengeti. Sedangkan PKL Sekunder adalah kota-kota kecamatan yang berfungsi sebagai simpul transportasi dan memiliki kegiatan primer yang mendorong perkembangan sektor strategis atau kegiatan khusus lainnya yang berskala regional. Kota-kota PKL Sekunder ini adalah Kota Pelabuhan Dagang, Tebing Tinggi, Wiroto Agung dan Muara Tembesi serta Sungai Bengkal.

*Penetapan Muara Sabak sebagai salah satu pusat pengembangan pada Pusat Pelayanan Regional merupakan peluang tersendiri bagi pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak, karena selaras kegiatan utama yang diarahkan di pusat pelayanan tersebut, yaitu pusat pemerintahan kabupaten, distribusi barang, **pusat industri pengolahan**, dan **pusat transportasi laut**.*

Untuk mendorong struktur ruang yang lebih berkesinambungan sesuai dengan konsep hirarki pelayanan, maka diciptakan jaringan aksesibilitas yang merata di seluruh wilayah provinsi khususnya menuju sentra produksi dari masing-masing pusat pelayanan serta antar pusat pelayanan. Berdasarkan hal tersebut maka jaringan transportasi yang membentuk struktur ruang wilayah Provinsi Jambi diarahkan sebagai berikut :

- A. Jaringan jalan arteri primer sebagai jalur utama lintas regional yang menghubungkan ibukota provinsi ke setiap ibukota kabupaten dan ke wilayah provinsi lain. Ruas jalan ini meliputi 3 (tiga) jalur utama yakni :

- 1) **Lintas Timur Sumatera**, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Riau yang dimulai dari Batas Sumsel-Tempino-Kota Jambi-Sengeti-Merlung-Pelabuhan Dagang-batas Riau. Jalur ini merupakan konsentrasi pergerakan mobilitas terbesar terutama pergerakan antar provinsi di Provinsi Jambi bagian Timur
- 2) **Lintas Tengah Sumatera**, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan-Jambi-Sumatera Barat, yang dimulai dari Singkut-Sarolangun-Bangko-Bungo-Batas Sumbar. Jalur ini menghubungkan daerah Selatan Sumatera dengan wilayah Barat Sumatera dengan konsentrasi pergerakan besar terutama untuk pergerakan antar provinsi di bagian barat Provinsi Jambi.
- 3) **Lintas Penghubung (*Feeder Road*)**, menghubungkan wilayah-wilayah dalam Provinsi Jambi. Jalur ini terdiri dari (1) Sarolangun-Pauh-Muara Tembesi dan (2) **jalur Bungo-Tebo-Muara Tembesi-Jambi-Muara Sabak**. Konsentrasi pergerakan dalam kategori tinggi karena menghubungkan wilayah barat Sumatera menuju wilayah timur Sumatera dan pada akhirnya **menuju Pelabuhan Muara Sabak sebagai outlet utama Provinsi Jambi**.

*Penetapan Muara Sabak sebagai outlet utama di Provinsi Jambi dan penetapan **jalur Bungo-Tebo-Muara Tembesi-Jambi-Muara Sabak** sebagai jalur penghubung (*feeder road*) dengan Jalan Lintas Timur Sumatera, merupakan peluang strategis bagi pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak. Penyediaan akses yang dapat diandalkan merupakan faktor penting dalam pengembangan kawasan tersebut.*

B. Jaringan jalan kolektor primer, yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan kota pusat pelayanan (ibukota kabupaten) dan sarana pemasaran (pelabuhan). Umumnya ruas kolektor primer di Provinsi Jambi berstatus jalan provinsi yaitu :

- ❑ Kuala Tungkal-Simpang Tuan
- ❑ Simpang Lagan-Muara Sabak
- ❑ Jambi-Suak Kandis-Rantau Rasau-Nipah Panjang
- ❑ Tempino-Bajubang-Muara Bulian
- ❑ Sp. Panerokan-Sei Bahar-Durian Luncuk

- ❑ Merlung-Lubuk Kambing-Simpang Niam
- ❑ Tebo-Pulau Tamiang-Batas Sumbar
- ❑ Pulau Tamiang-Wiroto Agung-Sp. Rimbo Bujang
- ❑ Bangko-Sungai Penuh-Kayu Aro-Batas Sumbar
- ❑ Sip. Pulau Rengas-Dusun Tuo-Jangkat
- ❑ Sarolangun-Muara Siau
- ❑ Simpang Sungai Duren-Ma. Bulian
- ❑ Bungo-Tanah Tumbuh-Rantau Pandan
- ❑ Sungai Penuh-Lempur

5.2 DUKUNGAN KOMODITAS AGRO-INDUSTRI PROVINSI JAMBI (SUMBER : STUDI FS PENGEMBANGAN JAIP)

Komoditas pertanian Provinsi Jambi yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap produksi nasional. Beberapa komoditas tersebut adalah karet, kelapa sawit, durian, kentang dan cabe dengan masing-masing kontribusi sebesar 10,20%, 6,70%, 7,16%, 5,48% dan 2,02%.

Dibandingkan dengan beberapa provinsi di sekitarnya, Provinsi Jambi mempunyai koleksi komoditas yang lebih lengkap. Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan tidak tercatat adanya komoditi jahe, kencur, lengkuas dan kunyit sedangkan Provinsi Jambi mencatat produksi yang cukup besar. Komoditi-komoditi tersebut adalah sumber bahan baku bagi industri biofarmaka yang saat ini cukup banyak diminati oleh masyarakat yang khawatir akan dampak negatif pengobatan kimia sintetis.

Selain mempunyai kontribusi terhadap produksi nasional, Jambi juga memberikan kontribusi terhadap ekspor nasional. Beberapa jenis komoditi pertanian yang diekspor langsung dari Jambi adalah kopi, karet, udang, sayuran, buah-buahan, ikan dan biji coklat. Volume produksi untuk tahun 2000, menunjukkan bahwa jenis komoditi agribisnis yang berperan besar adalah udang dengan volume ekspor mencapai 2.334,8 ton. Namun pada tahun 2003, volume ekspornya mengalami penurunan dan mencapai 687,97 ton. Tahun 2003, komoditi pertanian yang volumenya terbesar dan diekspor adalah ikan dan lainnya.

Ada 4 komoditi perkebunan utama yang diproduksi di Jambi yaitu karet, kelapa sawit, kelapa dalam dan kayu manis. Jenis komoditi terbanyak yang dihasilkan dari propinsi ini adalah kelapa sawit dengan jumlah produksi CPO mencapai 550.609 ton dan kemudian diikuti oleh karet sebesar 242.448 ton.

Produksi terbanyak untuk komoditi perkebunan terdapat di kabupaten Merangin, Batanghari, Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat. Total produksi komoditi perkebunan Jambi untuk komoditi tersebut di atas mencapai 989.003 ton.

Komoditas pertanian yang dipilih untuk mendukung JAIP terutama didasarkan kepada produksi komoditas yang saat ini sudah menjadi andalan Provinsi Jambi. Selain itu komoditas yang dipilih juga merupakan komoditas prioritas yang pengembangannya didorong oleh pemerintah dalam kaitannya dengan revitalisasi pertanian. Komoditas Prioritas Nasional yang didorong oleh pemerintah dalam rangka revitalisasi pertanian meliputi 14 komoditas, yaitu (RENSTRA Departemen Pertanian tahun 2006 – 2015) :

- (i) **Sub Sektor Tanaman Pangan**, meliputi : padi, jagung, kedelai, dan bawang merah.
- (ii) **Sub Sektor Hortikultura**, meliputi : pisang dan jeruk.
- (iii) **Sub Sektor Perkebunan**, meliputi kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dan tebu.
- (iv) **Sub Sektor Peternakan**, meliputi sapi dan ayam.

Hal tersebut juga harus didukung oleh kesesuaian lahan, ketersediaan lahan, dan lokasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan JAIP, diidentifikasi bahwa untuk pengembangan JAIP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, komoditas yang sesuai dikembangkan adalah **kelapa sawit, karet, tebu, kelapa, pisang, nanas, jeruk, lada, kedelai, jagung, padi, kentang dan bawang merah**. Dari penetapan komoditas ini, kemudian diidentifikasi potensi industri hilir yang mungkin untuk dikembangkan di Kawasan JAIP Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan pertimbangan :

- a. Merupakan industri strategis dimana hasil olahannya dapat digunakan oleh berbagai jenis industri lainnya
- b. Lebih diutamakan agroindustri skunder dan tertier
- c. Mempunyai industri hilir yang relatif banyak

- d. Menggunakan bahan baku yang diproduksi di Provinsi Jambi dan jumlahnya relatif lebih banyak dari komoditi lain di propinsi Jambi
- e. Sumber bahan baku lebih diutamakan berasal dari sekitar wilayah JAIP dalam koridor daerah tingkat II.
- f. Memberikan manfaat kepada masyarakat Jambi dan PAD Provinsi Jambi

Dengan demikian, industri hilir yang akan dikembangkan di Kawasan JAIP Tanjung Jabung Timur diarahkan pada pengembangan **Oleochemical (CPO); Crumb Rubber; dan Tepung Jagung.**

5.3 POTENSI DAN KENDALA PENGEMBANGAN

Berdasarkan kajian terhadap faktor eksternal dan analisis kondisi internal Kawasan JAIP Tanjung Jabung Timur (Muara Sabak), terdapat beberapa poin penting yang harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan konsep pengembangan kawasan, yaitu :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jambi 2006-2010 mengakomodasi pengembangan kawasan agro-industri melalui kebijakan dan program peningkatan daya saing agro-industri dan revitalisasi pembangunan pertanian.
2. Struktur perekonomian Provinsi Jambi didominasi oleh sektor pertanian yang didukung oleh industri pengolahan, dengan jenis industri yang dominan adalah industri berbasis agrobisnis. Pada kurun waktu 1990-2005, kontribusi kelompok industri agrobisnis mencapai 95% dari total output industri manufaktur, dengan industri dominan meliputi :
 - 341 Industri kertas, barang dari kertas dan sejenisnya → kontribusinya meningkat terus
 - 311 Industri makanan-1 → kontribusinya cenderung meningkat hingga 2005
 - 355 Industri karet dan barang dari karet → kontribusi berfluktuasi, tetapi menurun terus.
 - 331 Industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya → kontribusinya menurun terus

3. Kondisi fisik lahan mendukung untuk pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak, ditandai oleh :
 - ❑ Kondisi topografi yang cenderung datar, sehingga memungkinkan untuk pengembangan kegiatan terbangun.
 - ❑ Masih banyaknya lahan kosong yang dapat dijadikan lahan cadangan pengembangan kegiatan pendukung seperti pemukiman dan kebutuhan akan sarana dan prasarana lingkungan.
 - ❑ Lokasi JAIP terletak pada daerah bukan rawan bencana alam, hal ini disebabkan kondisi fisik tanah dan struktur batuan relatif stabil di seluruh wilayah sehingga mengurangi ancaman bencana alam akibat perubahan pada struktur tanah dan batuan.
 - ❑ Memiliki Wilayah perairan yang merupakan pintu akses yang sangat strategis, bahkan tidak menutup kemungkinan pengembangan transportasi sungai – laut (jalur Internasional).
 - ❑ Adanya dukungan sumber air baku yang cukup, dengan adanya Sungai Batanghari, yang masih belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber air baku.
4. Struktur perekonomian Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh sektor pertanian, terutama subsektor pertanian tanaman pangan dan perkebunan. Potensi ini dapat menjadi keunggulan tersendiri dalam menjawab tantangan kebutuhan Indonesia dan dunia akan komoditas pertanian, terutama karet, CPO dan olahannya.
5. Sistem transportasi saat ini belum mendukung secara optimal, terutama dalam hal ketersediaan jaringan jalan yang memadai dan outlet yang dapat diandalkan. Namun dimasa mendatang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut, ditandai dengan adanya :
 - ❑ Rencana pengembangan Jalan Lintas Timur Sumatera
 - ❑ Rencana pengembangan feeder road yang menghubungkan Muara Sabak dengan Jalan Lintas Timur Sumatera sebagai urat nadi pergerakan di P. Sumatera.
 - ❑ Adanya Pelabuhan Muara Sabak yang berpotensi untuk dikembangkan lebih optimal didukung oleh investasi yang memadai.

6. Pelayanan infrastruktur lainnya (utilitas wilayah) saat ini belum memadai, karena selain cakupan pelayanan yang belum besar, juga akibat belum optimalnya pemanfaatan sumber yang ada. Di masa mendatang, guna mendukung rencana pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak, diperlukan rencana penyediaan utilitas, tidak hanya bagi masyarakat setempat, namun juga untuk mendukung kegiatan industri yang akan dikembangkan. Utilitas yang utama diperhatikan dalam upaya mendukung kegiatan industri adalah air bersih, listrik, telekomunikasi, serta pengelolaan limbah cair dan padat.
7. Perlunya pertimbangan terhadap kawasan-kawasan limitasi, seperti hutan lindung dan DAS Batanghari. Pengembangan Kawasan JAIP Muara Sabak diharapkan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan disekitarnya. Untuk itu, konsep pengembangan yang akan diterapkan dalam pengembangan kawasan tersebut diarahkan pada konsep *eco-industry*, dimana dalam konsep tersebut, kegiatan dan kawasan industri dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi.